

Pancasila sebagai landasan dalam membentuk masyarakat yang berintegritas

Muhammad Zaki Fikri

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: 250201110006@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Integritas, Landasan Berintegritas, Masyarakat, Pancasila, Membentuk Masyarakat yang Berintegritas.

Keywords:

Integrity, Foundation of Integrity, Society, Pancasila, Forming a Society of Integrity.

ABSTRAK

Pancasila merupakan landasan filosofis utama dalam membentuk masyarakat Indonesia yang berintegritas tinggi. Kelima nilai yang ada dalam sila Pancasila menyediakan kerangka nilai yang komprehensif. Sila Ketuhanan dan Kemanusiaan mendasari nilai moral, kejujuran, dan tanggung jawab individu. Sila Persatuan menekankan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi. Sementara itu, Sila Kerakyatan dan Keadilan Sosial menjamin akuntabilitas, transparansi, dan egalitarianisme. Namun, terdapat beberapa hambatan dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Masalah internal seperti

korupsi dan nepotisme dalam pemerintahan serta masuknya budaya asing akibat globalisasi semakin memperparah situasi. Maka dari itu, Pancasila bertindak sebagai dasar atau landasan moral bagi seluruh elemen masyarakat. Internalisasi konsisten nilai-nilai ini merupakan kunci strategis dalam membangun budaya integritas yang kuat, dan menjamin tercapainya cita-cita keadilan sosial. Pengamalan Pancasila merupakan dalam mewujudkan masyarakat yang jujur, adil, dan bertanggung jawab.

ABSTRACT

Pancasila is the primary philosophical foundation for shaping an Indonesian society with high integrity. The five values contained within Pancasila provide a comprehensive framework of values. The principle of Belief in God and Humanity underpins moral values, honesty, and individual responsibility. The principle of Unity emphasizes the public interest over personal interests. Meanwhile, the principle of Democracy and Social Justice guarantees accountability, transparency, and egalitarianism. However, several obstacles exist in implementing Pancasila values in public life. Internal problems such as corruption and nepotism in government and the influx of foreign cultures due to globalization further exacerbate the situation. Therefore, Pancasila serves as a foundation or moral foundation for all elements of society. Consistent internalization of these values is a strategic key in building a strong culture of integrity and ensuring the achievement of the ideals of social justice. The practice of Pancasila is crucial in realizing an honest, just, and responsible society.

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara multikultural yang memiliki berbagai macam keberagaman baik suku, agama, dan budaya. Dengan banyaknya masyarakat yang berbeda-beda, tentu membutuhkan suatu alat atau landasan yang kuat dan kokoh agar tidak saling terpecah belah. Indonesia sendiri sudah mempunyai dasar ideologi yang dapat mempersatukan masyarakatnya yang beragam, yaitu Pancasila. Pancasila merupakan landasan bangsa Indonesia dalam beretika dan bermoral. Pancasila bukan hanya tentang lima sila, melainkan juga sebagai sistem etik yang terikat dengan Integritas sosial. Integritas adalah suatu kesatuan yang menggambarkan nilai jujur,



tanggung jawab, dan konsistensi moral baik dalam ucapan maupun tindakan (Akbar et al., 2021). Sebagai dasar negara, Pancasila memiliki peran dalam membentuk masyarakat yang berintegritas. Pancasila memberikan fondasi dalam mendefinisikan integritas. Disisi lain, integritas juga memiliki peran dalam mewujudkan nilai-nilai yang ada didalam Pancasila. Maka dari itu, pemahaman tentang implementasi nilai-nilai Pancasila diperlukan untuk membentuk masyarakat yang berintegritas, menciptakan bangsa yang adil dan makmur, serta terjalin kesatuan dan persatuan ditengah keberagaman saat ini (Maulida & Oktavia, 2025)

Pancasila memang memiliki nilai-nilai positif bagi warga negaranya. Meski begitu, penerapan dalam membentuk moral bangsa banyak mengalami masalah dan hambatan yang dapat merusak nilai-nilai pancasila. Salah satu masalah yang masih banyak terjadi adalah maraknya kasus deskriminasi, pembulian, atau bahkan intoleransi antar umat beragama (Dewantara & Atmanto, 2021). Hal ini tentu saja bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, munculnya budaya asing mempengaruhi pola pikiran dan etika berperilaku dalam masyarakat, yang membuat individu lupa dengan esensi kehidupan (Miftahusyai'an & Mulyoto, 2020). Banyak masyarakat terutama generasi muda yang mulai muncul perilaku individualisme, perilaku yang mementingkan diri sendiri dan tidak peduli dengan orang lain. Pengaruh globalisasi juga menyebabkan generasi muda mengalami krisis identitas terhadap bangsanya sendiri. Perilaku seperti ini tentu sangat menyimpang dari budaya masyarakat indonesia yang mengutamakan kebersamaan. Berbagai konflik di jumlah daerah seperti pertikaian antar suku dan agama juga dapat mengancam persatuan karena bisa memecah belah bangsa. Apabila masalah tersebut tidak segera diatasi, tujuan dan cita-cita bangsa akan sulit dicapai. Nilai Pancasila antara yang satu dengan yang lain perlahan juga akan memudar jika salah satunya saja tidak terlaksana (Padilah & Dewi, 2021)

Pancasila mempunyai landasan yang kuat karena Pancasila bukan hanya sebagai ideologi, tetapi juga sebagai etika dalam bersikap. Sebagai ideologi negara, Pancasila berperan sebagai dasar negara yang mengatur tindakan seluruh warga negara baik individu maupun masyarakat (Sari et al., 2025). Dalam membentuk integritas masyarakat harus berdasarkan dengan nilai etika ucapan maupun tindakan yang diakui bersama. Pada sila kedua, Pancasila menekankan untuk berperilaku kemanusiaan, peduli terhadap sesama, dan mengakui setiap martabat. Untuk menunjukkan perilaku warga negara yang berintegritas, masyarakat harus memahami nilai-nilai yang ada didalam Pancasila dan menanamkan setiap nilai dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila dalam sila ketiga dan kelima, memperlihatkan bahwa keadilan sosial, persatuan, dan integritas merupakan hal yang penting dalam membangun masyarakat sosial. tanpa fondasi dan ideologi yang kuat, masyarakat Indonesia akan cenderung kesulitan menentukan arah dan tujuan hidupnya, menimbulkan perilaku menyimpang dari moral, dan penurunan integritas bangsa. Dengan demikian, dibutuhkan strategi atau rencana dalam mengusahakan cara menanamkan kesadaran dan implementasi nilai Pancasila di kehidupan masyarakat (Widiarti & Fitria, 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi peran Pancasila sebagai dasar negara dalam upayanya membangun masyarakat yang berintegritas ditengah era globalisasi saat ini. Penelitian ini mempunyai dua tujuan utama: menjelaskan tentang peran

pancasila disetiap sila-silanya, kedua, mengidentifikasi problematika yang terjadi dimasyarakat sehingga menghambat pembentukan integritas. Oleh karena itu, Studi ini bukan hanya menjelaskan tentang integritas yang ada dalam nilai Pancasila, tetapi juga menawarkan solusi dari berbagai masalah terkait kurangnya kesadaran masyarakat tentang etika Pancasila. Diharapkan dapat membantu mengurangi problematika yang saat ini marak terjadi, memberi pemahaman mendalam tentang Integritas nilai-nilai Pancasila, serta menanamkannya didalam setiap individu di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini ikut dalam usaha menciptakan masyarakat yang adil, dan beretika, berorientasi pada pembangunan manusia Indonesia, serta membantu Indonesia dalam mewujudkan tujuan negara yang berlandaskan pada UUD 1945 dan Pancasila ditengah berbagai macam kendala akibat globalisasi dan tantangan internal bangsa, yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kukuh secara moral dan berintegritas tinggi (Susilawati et al., 2025).

Pembahasan

Nilai-Nilai Pancasila sebagai Landasan Berintegritas

Suatu konsep yang dianggap baik, penting dan diharapkan pada kehidupan masyarakat tertentu disebut sebagai nilai. Nilai merupakan sesuatu yang diikuti oleh banyak orang dan digunakan sebagai patokan dalam membentuk moral, membangkitkan semangat, dan alat pemersatu dalam masyarakat. Pancasila sendiri mempunyai nilai-nilai yang diambil dari segala aspek yang ada di Indonesia seperti adat istiadat, dan budatya masyarakat. Pada dasarnya, nilai-nilai Pancasila digunakan sebagai landasan dalam berperilaku, tetapi nilai nilai itu mulai luntur akibat globalisasi dan kemajuan teknologi (Mardin, 2025). Sila pertama, “Ketuhanan Yang Maha Esa”, menanamkan kesadaran bermoral bahwa setiap perbuatan yang dilakukan manusia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Tuhan, sehingga menodorong setiap individu untuk bertindak jujur, amanah, dan menjauhi hal hal yang dapat merugikan orang lain. Dimensi keimanan ini berfungsi sebagai landasan moral yang paling efektif dalam mencegah perilaku yang menyimpang.

Lalu ada Sila kedua, “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”, menuntut pengakuan dan penghormatan terhadap martabat pada setiap individu, yang secara langsung mengartikan integritas ke dalam perlakuan yang adil, tidak mendiskriminasi, dan penuh etika dalam interaksi sosial masyarakat. Nilai ini tidak hanya mendorong setiap individu untuk kompeten, tetapi juga bertanggung jawab secara moral dan etika. Penginternalisasian nilai-nilai ini dapat melalui pendidikan karakter dan sosialisasi yang berkelanjutan, dengan cara menggerakkan integritas dari yang awalnya aturan formal menjadi etika yang tertanam dalam diri, memastikan bahwa integritas menjadi budaya, bukan hanya tuntutan sementara. Dengan demikian, Pancasila dapat menjadi dasar landasan yang kokoh bagi individu untuk menolak penyimpangan dan mempertahankan nilai moral dalam menghadapi tantangan di era modern (Akbar et al., 2021).

Bukan hanya sekadar integritas, nilai-nilai yang ada pada Pancasila berfungsi sebagai dasar integrasi dalam membentuk masyarakat dan kebijakan publik, yang sangat penting untuk pembangunan dan stabilitas nasional. Integritas yang kolektif dapat

dilihat dari kualitas tata kelola pemerintahan, tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga negara, dan minimnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam negara. Sila ketiga, “Persatuan Indonesia”, menuntut untuk mengutamakan kepentingan persatuan di atas kepentingan pribadi atau golongan, yang merupakan tugas bagi pejabat publik untuk melayani masyarakat dan menolak konflik kepentingan (Muarofah, 2021).

Integritas kolektif ini juga diperkuat oleh nilai sila keempat, “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan”, yang mengharuskan proses dalam pengambilan keputusan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, sehingga menolak tindakan otoritarianisme dan kolusi yang dapat merusak integritas sistem politik. Terakhir, Sila kelima, “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, menjadi standar etika tertinggi bahwa segala sumber daya publik harus dikelola dengan jujur dan didistribusikan secara adil kepada rakyat, yang secara langsung membatasi ruang gerak bagi perilaku korupsi dan nepotisme. Oleh karena itu, ketidaklaksanaan dalam membangun integritas dapat diartikan sebagai kegagalan sistem dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam struktur kelembagaan. Dengan demikian, Pancasila harus digunakan sebagai landasan moral bagi setiap kebijakan dan pembangunan (Silaban, 2023).

Urgensi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Masyarakat

Terdapat beberapa tantangan yang dapat menghambat pembentukan integritas di masyarakat. Salah satu dari tantangan tersebut adalah tata kelola pemerintahan dan ekonomi yang tidak adil. Fenomena Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) menjadi penghambat yang paling signifikan, karena praktik KKN menciptakan bahaya moral dan melegitimasi standar ganda dalam etika yang dimana di satu sisi, masyarakat diharuskan untuk memiliki sikap berintegritas, namun di sisi lain, pemerintahan dan elit politik sering kali menunjukkan perilaku tidak bermoral tanpa sanksi yang tegas atau penegakan hukum yang tumpul. Lingkungan korup secara efektif merusak motivasi karakter individu untuk bertindak jujur, sehingga menciptakan kondisi yang dikenal dengan kekosongan norma. Selain itu, kesenjangan sosial dan ekonomi sangat kontras dengan nilai Sila Kelima Pancasila, hal ini menciptakan masyarakat yang dimana mereka akan mencari jalan pintas demi bertahan hidup dan meningkatkan status sosial meskipun dengan cara yang tidak etis, seperti kasus penyuapan atau pelanggaran aturan demi keuntungan pribadi. Problematika ini diperparah oleh rendahnya kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum dan politik akibat penanganan kasus korupsi yang dianggap tidak tegas. Keadaan ini menciptakan siklus ketidakpercayaan yang dapat melemahkan hubungan sosial dan menghancurkan rasa kebersamaan, padahal fondasi utama bagi pembangunan integritas kolektif adalah keadilan (Afrilian et al., 2025).

Hambatan dalam membentuk integritas juga bersumber dari problematika sosial yang telah tergerus oleh modernisasi, urbanisasi, dan masuknya budaya asing ke Indonesia (Alisah, n.d.). Salah satu tantangan terbesar adalah munculnya sikap individualisme dan materialisme yang secara agresif menggeser nilai-nilai Pancasila, khususnya Sila Ketiga “Persatuan Indonesia” dan Sila Kelima “Keadilan Sosial”. Munculnya budaya yang didominasi oleh orientasi pada kepentingan pribadi semata, membuat nilai-nilai seperti kejujuran, pengorbanan, dan gotong royong menjadi

tersingkirkan. Hal ini menciptakan masyarakat yang cenderung pragmatis dan melakukan segalanya agar tujuannya berhasil meski dengan cara yang salah, tanpa mepedulikan proses etisnya. Pengikisan nilai gotong royong juga dapat memutus ikatan sosial, padahal seharusnya gotong royong berfungsi sebagai mekanisme untuk mengatur moral dalam masyarakat. Dulu, teguran atau sanksi sosial dari tetangga atau komunitas secara efektif menjaga integritas, namun saat ini, dengan semakin tertutupnya kehidupan pribadi dan tingginya mobilitas, kontrol sosial menjadi melemah. Ditambah, fenomena digitalisasi dan penyebaran informasi yang tidak terfilter juga berkontribusi pada kemerosotan moral, di mana standar etika menjadi relatif dimana hoaks sering kali merusak kemampuan masyarakat untuk membedakan kebenaran dan kebohongan, yang merupakan basis kognitif bagi integritas masyarakat. Dalam menghadapi globalisasi diperlukan identitas nasional yang dinamis, mudah beradaptasi, dan mempunyai revitalisasi pendidikan karakter serta literasi media yang kuat, yang dimana hal tersebut terkandung dalam nilai-nilai Pancasila (Febri et al., 2025).

Peran Pancasila Dalam Membentuk Masyarakat yang Berintegritas

Selain digunakan sebagai dasar negara, Pancasila juga berperan sebagai landasan setiap norma dan mengatur etika personal dalam membentuk individu yang berintegritas, yang dapat diwujudkan melalui Sila Pertama dan Kedua. Sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” berfungsi sebagai dasar moralitas masyarakat, menanamkan kesadaran bahwa kejujuran, konsistensi dalam bermoral, dan membela kebenaran, bukan karena tuntutan hukum, melainkan karena adanya kesadaran etika dalam diri (Priwardani et al., 2023). Prinsip ini mendorong individu untuk selalu berfikir sebelum bertindak, bahkan dalam ruang privat atau saat tidak ada pengawasan, karena adanya pertanggungjawaban yang lebih tinggi. Integritas dalam diri semakin diperkuat oleh Sila “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”, yang mewajibkan setiap warga negara untuk menjunjung tinggi setiap martabat manusia, menolak segala bentuk deskriminasi, dan berinteraksi berdasarkan moral dan etika. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya memberikan batasan perilaku tetapi juga memberikan arah yang positif untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih berintegritas. Jika nilai-nilai ini diterapkan sejak dini maka Pancasila yang awalnya sekadar ideologi negara menjadi kode etik perilaku sehari-hari, yang sangat fundamental dalam menolak praktik-praktik penyimpangan moral (Vaneza et al., 2024).

Di tingkat kolektif dan institusional, Pancasila berperan sebagai fondasi utama integritas dan akuntabilitas publik, terutama nilai yang ada dalam Sila Ketiga, Keempat, dan Kelima. Sila Persatuan, Indonesia menuntut para pejabat dan masyarakat untuk lebih mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok atau pribadi, sistem politik dan birokrasi harus menghindari konflik secara tegas agar membentuk integritas (Murdiansyah & As, 2025). Sila “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan” menyediakan ruang untuk mengambil suatu keputusan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel, yang merupakan perlawanan langsung terhadap praktik kolusi dan otoritarianisme (Rahmasari et al., 2024). Integritas institusional mencapai puncaknya pada Sila “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, yang menuntut pengelolaan sumber daya negara secara adil dan jujur, tanpa adanya diskriminasi atau manipulasi untuk memperkaya

pejabat elite. Dengan demikian, Pancasila berfungsi sebagai landasan dalam keseimbangan moral yang memastikan bahwa segala bentuk tata kelola pemerintahan dan kebijakan publik dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip etika yang tinggi dan diabdikan sepenuhnya demi kesejahteraan bersama, bukan demi kepentingan pribadi atau golongan, sehingga integritas dapat terbentuk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Liana et al., 2025)

Kesimpulan dan Saran

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pancasila merupakan landasan filosofis dan etis yang sangat berhubungan dengan nilai-nilai etika dalam masyarakat. Kelima sila, mulai dari Ketuhanan Yang Maha Esa hingga Keadilan Sosial, mempunyai kerangka nilai yang komprehensif, menuntun setiap warga negara dan pemerintahan untuk bertindak jujur, bertanggung jawab, dan konsisten antara perkataan dan perbuatan. Sila Ketuhanan mendorong moralitas universal, Kemanusiaan menuntut penghormatan terhadap hak setiap individu, Persatuan mengutamakan kepentingan kolektif di atas kepentingan pribadi, Kerakyatan menekankan transparansi dan akuntabilitas dalam mengambil keputusan, dan Keadilan Sosial menegaskan tentang pentingnya kesejahteraan dan antikorupsi. Maka dari itu, pengamalan nilai-nilai Pancasila berfungsi sebagai fondasi utama melawan praktik-praktik penyimpangan, memastikan bahwa setiap kebijakan dan perilaku sesuai dengan prinsip-prinsip etika budaya bangsa. Integritas yang bersumber dari Pancasila merupakan integritas yang berdimensi ganda, yaitu moral dan sosial, menjadikannya prasyarat esensial bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, adil, dan dipercaya oleh publik.

Berdasarkan temuan tentang peran Pancasila dalam integritas, disarankan agar upaya peningkatan sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai Pancasila melalui metode yang lebih inovatif dan kontekstual di semua bidang pendidikan dan sosial politik. Pemerintah dan institusi terkait perlu merevisi kurikulum dan program pelatihan pegawai negeri untuk tidak sekadar menghafal, tetapi juga fokus pada praktik langsung nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dalam berperilaku sehari-hari, terutama dalam menghadapi dilema etika dan korupsi. Selain itu, disarankan untuk mengembangkan suatu Indeks Integritas Nasional berbasis Pancasila, yang secara berkala mengevaluasi serta mengawasi sejauh mana instansi publik dan swasta mencerminkan nilai-nilai luhur ini dalam operasional mereka. Perluasan riset yang disiplin dan lebih lanjut juga sangat diperlukan untuk mengkaji seberapa efektif kurikulum pendidikan antikorupsi yang diimplementasikan pada kehidupan masyarakat, yang sesuai dengan Sila Keadilan Sosial, serta menganalisis peran aktif suatu komunitas dan media digital dalam mempromosikan nilai Pancasila sebagai teladan integritas. Dengan penekanan pada internalisasi karakter yang mendalam, Pancasila akan berubah dari yang awalnya hanya sekadar dasar negara menjadi landasan moral yang mengakar kuat, dan menjamin keberlanjutan pembangunan masyarakat yang berintegritas.

Daftar Pustaka

- Afrilian, A. H., Saepudin, E. A., Ramadhani, I., Aqila, A. N., & Nurhasna, F. (2025). Pages : 3942-3952. 2(3).
- Akbar, A., Guru, P., Dasar, S., Buton, U. M., Pemerintahan, I., & Buton, U. M. (2021). *Jurnal abdidas*. 2(3), 512–520.
- Alisah, P. (n.d.). *Implementasi Nilai - Nilai Pancasila Dalam Menghadapi*.
- Dewantara, A., & Atmanto, H. (2021). Pancasila sebagai sumber etika publik dalam membangun integritas nasional. *Jurnal Etika Sosial*, 12(2), 45–57.
- Febri, V., Putri, A., Pratiwi, I. H., Hidayatullah, A. D., Malik, M., Malang, I., Timur, J., & Kunci, K. (2025). *Kritisisme Konstruktif dan Dialog Antar Generasi : Mewujudkan Pancasila yang Relevan di Era Globalisasi*. 3. <https://repository.uin-malang.ac.id/24556/7/24556.pdf>
- Liana, I. N., Ismi, J., & Laeli, R. (2025). *Journal of education*. 1(1).
- Maulida, M., & Oktavia, N. (2025). *Jurnal Penelitian Nusantara Pendidikan Pancasila Sebagai Landasan Pembentukan Karakter Bangsa Yang Berintegritas Menulis : Jurnal Penelitian Nusantara*. 1(2012), 83–87.
- Miftahusyai'an, M., & Mulyoto, G. P. (2020). *Relasi Agama - Manusia dalam Spirit Pancasila (Membangun Egalitarianisme dalam Kemerdekaan Keyakinan)*. 5(2), 44–53. <https://repository.uin-malang.ac.id/7888/1/7888.pdf>
- Murdiansyah, I., & As, M. (2025). *Pentingnya Spirit Pancasila Benteng Penahan Gempuran Artificial Intelligence Dalam Bisnis Dan Pendidikan Akuntansi*. 10(10), 36–42. <https://repository.uin-malang.ac.id/23881/2/23881.pdf>
- Padilah, A. N., & Dewi, D. A. (2021). *Nilai moral Pancasila untuk membangun bangsa di era globalisasi*. 4(2), 82–87. <https://doi.org/10.12928/citizenship.v4i2.20536>
- Priwardani, A. N., Auriellia, A., Monica, D., Nur, M., & Yaasiin, F. (2023). *PANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKA*. 2(3), 226–232.
- Rahmasari, R., Ludigdo, U., Djamhuri, A., & Accountability, P. (2024). *PANCASILA ACCOUNTABILITY AS A CRITICISM OF PUBLIC*. 32(1), 112–127.
- Sari, P., Julianty, M., Chaira, S., Tarigan, B., & Hutagalung, Y. O. (2025). *Cendikia pendidikan*. 13(5). <https://doi.org/10.9644/sindoro.v3i9.252>
- Silaban, P. S. M. (2023). Pancasila sebagai sistem etika: Menjaga integritas sosial dan budaya dalam kehidupan berbangsa. *Sindoro Cendekia Pendidikan*, 4(1), 15–28.
- Susilawati, M. D., Indrawati, E., & Shalom, E. Y. (2025). *Pancasila as Philosophical Basis in Strengthening National Character in the Era of Globalization*. 3(01), 63–75.
- Vaneza, A. P., Islam, U., Sultan, N., Kasim, S., Islam, U., Sultan, N., Kasim, S., Sari, D. P., Islam, U., Sultan, N., Kasim, S., Andestiko, R., Studi, P., Matematika, P., Tarbiyah, F., Keguruan, D., Negeri, I., Syarif, S., Riau, K., ... Riau, P. (2024). *ETIKA PANCASILA SEBAGAI PANDUAN MORAL BAGI*. 1(5), 312–320.
- Widiarti, & Fitria. (2023). Peran penting Pancasila dalam membangun kesatuan dan keadilan sosial terhadap perlindungan hak asasi manusia. *Millatuna*, 5(2), 120–136.